



---

## **INTERVENSI SWASTA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA MADAPOLO KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Bakri La Suhu<sup>1</sup>, Marno Wance<sup>2</sup>, Rasid Pora<sup>3</sup>, Abdulah Kaunar<sup>4</sup>, Sadik Dahlan<sup>5</sup>

<sup>1 3 4 5</sup> Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, <sup>2</sup> Universitas Pattimura

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 16 Juni 2019

Disetujui: 20 September  
2019

Dipublikasikan: 25  
September 2019

**Kata Kunci:**

Pemberdayaan,  
Swasta, Masyarakat  
Nelayan

### **Abstrak**

Untuk mencapai masyarakat yang berdaya dan berkemajuan sangatlah membutuhkan partisipasi instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat nelayan agar mampu *survive* ditengah era globalisasi. Pemberdayaan masyarakat nelayan oleh pihak swasta yang berada di Desa Madapolo dirasakan sangat membantu masyarakat terutama bagi para nelayan, Sejauh ini belum ada lagi bantuan yang diberikan oleh pihak terkait, hanya Dinas Kelautan dan Perikanan yang pernah memberikan bantuan ditahun 2000.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intervensi swasta dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Madapolo di Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung, wawancara dan dokumen menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain :kepala desa, Ketua BPD, tiga orang pengusaha, dan 9 orang nelayan. Sedangkan data sekunder antara lain dokumen berupa foto hasil pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan oleh pihak pengusaha swasta berdampak besar bagi perkembangan masyarakat nelayan yang berada di Desa Madapolo terutama pada segi pendapatan, kondisi keluarga dan juga pada pendidikan anak. Pada sisi yang lain, pemberdayaan nelayan dihadapkan dengan sejumlah kendala antara lain: cuaca buruk, gangguan kesehatan, dan acara keluarga.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh pihak swasta saat ini sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, ditengah minimnya bantuan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik -baiknya.

---

---

## PRIVATE PARTY INTERVENTION COMMUNITY EMPOWERMENT (Study at Central Madaopolo Village, North Obi District)

---

**Keyword:**

Empowerment,  
Private Sector,  
Fishing  
Community

**Abstract**

To reach an empowered and progressive fishing communities requires the participations of relevant agencies. The agencies participations are needed in empowering the fishing communities in order for them to be able to survive in the era of globalization. Taking an example, empowerment of fishing communities by the private sector in Madapolo village is perceived to be very helpful for the fishing community because after getting some assistance from the Department of Marine and Fisheries in 2000, there is no more guidance for empowerment activities given to the communities involved in this program.

This study aims at finding out the private intervention in empowering fishing communities in Madapolo Village. This study employs a qualitative descriptive research. The techniques used for collecting data are direct observation techniques, interviews and documents analysis using data reduction analysis techniques, displaying data (data presentation) and verification (gathering conclusions). The primary data sources in this study include the head of the village, the chairperson of BPD, three entrepreneurs, and nine fishermen. Meanwhile secondary data include other documents containing the pictures of empowerment results.

Based on the results of the study, it reveals that the empowerment of fishing communities in Madapolo village by private agencies has increased several aspects in the life of fishing communities such as family income, family economic conditions and children's education. It is also found that the problems or barriers faced by the empowerment programs are bad weather, health problems, and family events.

From the results of study, it can be concluded that the empowerment provided by the private sector is very important to increase the fishermen's welfare in the midst of minimum assistance from the local government. Therefore, it is expected that the provided assistance can be used as well as possible.

---

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

[bakrilasuhu@yahoo.co.id](mailto:bakrilasuhu@yahoo.co.id), [ipmummu@gmail.com](mailto:ipmummu@gmail.com), [porarasyid@gmail.com](mailto:porarasyid@gmail.com),  
[akukaunar@yahoo.com](mailto:akukaunar@yahoo.com),

### PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya termasuk jenis makhluk yang hidup di daratan, maka adalah wajar jika hampir seluruh perhatiannya terarah kepada pemanfaatan sumber daya alam di darat. Tetapi perlu disadari bahwa sebagian besar permukaan bulatan bumi ini terdiri atas air. Khususnya bagi wilayah Indonesia yang sebagian besar juga terdiri atas permukaan laut. Indonesia merupakan negara bahari dengan 70 % wilayahnya adalah perairan, sehingga laut merupakan lingkungan fisik yang lebih

menonjol (Dendasurono, 2005). Pemanfaatan sumber daya kelautan haruslah di perhatikan. Di Indonesia, pelestarian lingkungan selama ini hanya terfokus pada pelestarian lingkungan yang ada di darat saja. Perlu di ingat kembali, sejak zaman dahulu para nenek moyang bangsa kita sudah menggantungkan hidup mereka kepada laut. Tentunya, sangatlah penting memperhatikan pelestarian sumber daya kelautan khususnya sumber daya perikanan.

Ketika pemerintahan memisahkan manajemen penentu kebijakan dari pemberian pelayanan, mereka sering tidak merasa mempunyai kemampuan manajemen penentu kebijakan yang sesungguhnya, (Osborne dan Geabler,2000), maka terjadilah diskomunikasi antara manajemen penentu kebijakan dan pemberi kebijakan. Kepentingan masyarakat Indonesia memiliki kekhususan masalah sejenis yang dihadapi, yang dengan demikian membutuhkan cara pemecahan yang tersendiri pula. Kesalahan terhadap kebijakan pembangunan di masa lalu tersebut ditebus dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hadirnya KKP merupakan bukti tumbuhnya kesadaran dan kemauan politik pemerintah dalam membangun kelautan dan perikanan. Keberadaan KKP diharapkan membawa angin segar bagi industri kelautan dan perikanan, terutama masyarakat nelayan yang selama ini menjadi korban pembangunan.

Namun dalam perjalanannya, ternyata keberadaan KKP dengan program-programnya, khususnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) hingga saat ini belum mampu menciptakan nelayan-nelayan tangguh dan sejahtera. Tentu saja ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan yang digunakan oleh para akademisi, LSM dan birokrat dalam melaksanakan program pembangunan, terlebih program yang hanya bersifat proyek *ansich* (jangka pendek). Problem pembangunan yang terjadi menjadi catatan kepada kita semua khususnya kepada para pembuat kebijakan (*policy maker*) akan pentingnya pendekatan sosial budaya sebagai basis atau instrumen pemberdayaan masyarakat nelayan. Mengingat secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) berbeda dengan kelompok masyarakat pedesaan (petani) yang ada di daratan. Selain itu, karakteristik sumber daya dan geografis antar daerah sangat beragam. Jadi, akibat pemaksaan, ketidaktahuan pendekatan dan homogenisasi pelaksanaan program pembangunan untuk masyarakat nelayan pasti akan membuahkan kegagalan (Kusnadi, 2005).

Pendekatan melalui sosial budaya yang berbasis pada instrumen pemberdayaan akan mempermudah pemberdayaan yang selama ini selalu menemui jalan buntu, karena berbenturan dengan masalah sistem sosial yang berbeda di lingkungan masyarakat nelayan, karena pada umumnya keadaan sosial budaya yang ada di suatu masyarakat nelayan berbeda dengan sosial budaya yang ada pada masyarakat nelayan yang lainnya. Menurut Sumardjono (2008) Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat untuk pertama kalinya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun yang terpenting adalah pengakuan hak ulayat tidak hanya menjadi bagian komitmen dari bangsa Indonesia semata tetapi eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat sorotan dunia internasional yang tertuang pada berbagai konferensi internasional (Daud, 2015).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat nelayan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat pembangunan keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar sehat fisik dan mental dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengimbangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan ini menjadi sumber dari apa yang ada di dalam wawasan politik pada tingkat nasional yang disebut dengan ketahanan nasional (Totok, 2015). Upaya-upaya ini untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari.

Pendidikan (lingkungan) kelautan harus menyiapkan individu yang bertanggung jawab atas perubahan teknologi dunia yang cepat, memahami masalah-masalah regional dan internasional, dan menyiapkan keterampilan yang diperlukan, keterampilan yang produktif seperti halnya yang sebenarnya masyarakat lakukan, dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup kelautan, (Dendasurono, 2005). PLK (Pendidikan Lingkungan Kelautan), apakah hal itu dalam bentuk program yang bersifat dasar dan umum ataupun program yang bersifat spesifikasi, mutlak perlu bagi generasi muda sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing, atau bagi masyarakat dalam bentuk pendidikan yang diberikan di luar sekolah. "Memberikan informasi kepada masyarakat dan menciptakan suatu kesadaran umum terhadap timbulnya masalah-masalah kelautan, meningkatkan rasa menghargai terhadap lingkungan yang sehat dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap laut merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Dalam kaitannya dengan hal

ini aspek-aspek internasional yang bersangkutan perlu mendapat perhatian". (Dendasurono, 2005).

Halmahera Selatan sebagai salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan luas lautan lebih besar dari daratan, memberikan pengaruh sosio kultur bagi kehidupan masyarakat setempat. Dengan kondisi geografis wilayah yang dikelilingi laut, maka praktis masyarakat di kabupaten ini tinggal dan menetap di daerah pesisir pantai. Kondisi geografis tersebut tentunya sangat berpengaruh pada orientasi masyarakat terhadap laut dan eksistensinya. Berbagai aktifitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Halmahera Selatan senantiasa menjadikan laut sebagai sarana utama dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat tersebut. Untuk itu laut dalam pandangan masyarakat Halmahera Selatan bukan pemisah antara wilayah namun sebaliknya laut adalah penghubung antara wilayah, yang dapat memadukan berbagai kepentingan sosio kultur masyarakat (Daud, 2015). Umumnya masyarakat nelayan adat wilayah pesisir yang mendiami wilayah pesisir memiliki ikatan-ikatan dengan wilayah laut. Ikatan-ikatan istimewa tersebut berbentuk hubungan kultur antara komunitas masyarakat nelayan adat dengan wilayah laut. Suatu hubungan kultur biasanya telah dipercaya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selain hukum kultur, masyarakat nelayan biasanya sangat menyadari bahwa laut dan sumberdaya yang dimilikinya adalah anugerah tuhan yang sangat besar bagi manusia (Daud, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakri La Suhu, Dkk tentang pemberdayaan nelayan di Halmahera Selatan menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat petani rumput laut Desa Mano yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, antara lain (1) pembentukan kelompok petani rumput laut, pembentukan kelompok ini dimulai sejak tahun 2011 sampai 2015 dan sekarang kelompok petani rumput laut berjumlah 19 kelompok, (2) pemberian bantuan alat produksi berupa pelompong dan penjemuran, namun bantuan yang diberikan dimaksud belum sepenuhnya dibagikan kepada 19 kelompok karena terbatasnya anggaran sehingga bantuan berupa pelompong hanya 192 unit untuk 5 kelompok dan alat penjemuran 16 unit untuk 2 kelompok saja. (Suhu, Wance, Dkk, 2019 ).

Masyarakat nelayan pada umumnya di wilayah Halmahera Selatan, khususnya di Desa Madopolo Tengah, masih diperhadapkan dengan sejumlah masalah. Berdasarkan hasil pantauan penulis dapat ketahui sejumlah masalah yang dihadapi antara lain: kesediaan modal, saran prasarana, dan keterampilan dalam berneelayan.

Menurut Bapak Aman La Baco salah satu nelayan di Desa Madopolo Tengah hingga kini belum adanya bantuan modal, penyediaan sarana prasarana pendukung, serta pelatihan yang disediakan oleh pemerintah desa setempat. Hal yang sama disampaikan oleh bapak Lajono salah satu nelayan di madopolo tengah dan juga kurangnya kepedulian pemerintah Desa Madoplo Tengah terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir terutama kepada kami masyarakat nelayan. Kehadiran pengusaha/swasta di Desa Madapolo Tengah membawa sedikit angin segar kepada para nelayan sehingga dapat menghidupi keluarga mereka setidaknya mereka tidak jauh-jauh menjual hasil tangkapannya ke tempat pejualan sekitar dan bahkan dibawa harga karena kualitas ikan telah menurun karena terlalu lama ditangkap mengingat jarak yang ditempuh. Kehadiran pengusaha juga mempermudah para nelayan mendapatkan infrastruktur penunjang penangkapan seperti tali pencing, mata kail, ikan yang digunakan untuk umpan, BBM (bahan bakar minyak) dan es balok agar hasil tangkapan tetap terjaga kesegarannya.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan hasil data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara secara langsung. Tujuan penelitian deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, aktual dan akurat fakta-fakta penelitian yang terjadi. Adapun lokasi penelitian yang dipilih untuk dilakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, adalah Desa Madopolo Tengah Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, karena Desa Madopolo Tengah dijadikan indikator untuk mengetahui tentang bagaimana intervensi swasta dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Karena hati penulis merasa terpanggil untuk meneliti hal ini, dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini merupakan peneitian kualitatif dan dilakukan dengan pendekatan deskriptif yaitu sifatnya dapat menggambarkan satu fenomena sosial yang terjadi di lapangan apa adanya (Moleong, 1993).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Madapolo Tengah, tentang intervensi swasta dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, ditemukan bentuk bantuan alat tangkap. Pemberian alat tangkap sangat membantu dan memberikan

akses yang baik dalam mendapat perlengkapan yang canggih dan masih baru. Sehingga hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Urgensi Bantuan**

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan inftrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari banyak tantangan yang dihadapi para nelayan di jaman modern dengan kebutuhan yang sangat kompleks, tuntutan kepada nelayan untuk bertahan (*survive*) demi menghidupi keluarga. Nelayan harus produktif dan membangun keberdayaan mereka sendiri dengan memanfaatkan kehadiran pengusaha ikan atau swasta itu sendiri, diharapkan dengan bantuan yang di berikan kepada para nelayan seperti kelengkapan alat-alat pancing, mempermudah nelayan dan menambah produktifitas tangkapan mereka. Nelayan yang berada di Desa Madopolo terbagi atas dua jenis nelayan berdasarkan jenis tangkapan yaitu, nelayan ikan tuna dan nelayan ikan dasar, pemberian bantuan kepada para nelayan juga mendapat pengecualian. Nelayan ikan tuna mendapat bantuan tanpa pesanan sebelumnya, tetapi bagi para neayan ikan dasar haruslah mereka pesan, itu pun bagi mereka yang telah terikat kontrak dan telah saling kenal satu sama lainnya. Berikut hasil temuan analisis penelitian dengan Bapak Aman Labaco, beliau menuturkan bahwa :

*“Bantuan yang diberikan kepada para nelayan selama ini terbilang sangat membantu kami khususnya nelayan ikan tuna, karna sebelum adanya bantuan ini kami sering menemukan kendala, apa lagi menyangkut ketersediaan kelengkapan pendukung bernelayan, misalnya es, umpan dan bbm. Itu disediakan sepanjang kami pergi melaut” (Hasil temuan analisis, tanggal 4 Februari 2017)*

Kesulitan mendapatkan infrastruktur dirasakan oleh para nelayan ikan dasar, karena pendapatan nelayan yang tak menentu dan juga modal pengusaha ikan dasar membuat pengusaha ikan menurunkan harga dan penyediaan infrastruktur pendukung bagi para nelayan, walaupun pengusaha menyediakan infrastruktur pendukung

penangkapan bagi para nelayan, haruslah mereka yang telah terikat, saling kenal dan di pesan jauh hari sebelum diambil. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Laele Burhanudin, beliau menuturkan bahwa :

*“ Selama ini kami pergi melaut, kami hanya mengandalkan ketersediaan kelengkapan pendukung melaut, misalkan umpan, es dan minyak, yang menyediakan itu semua adalah kami sendiri kalupun kami disediakan oleh para pengusaha ikan (dibo-dibo,bahasa akrab di Desa Madopolo)harus lah bagi mereka yang telah terikat dan saling kenal dan dipesan jauh hari sebelum melaut agar dapat di sediakan sebelum kami pergi melaut” (Hasil temuan analisis, pada tanggal 7 Februari 2017)*

Kehadiran pengusaha/swasta khususnya pengusaha ikan tuna dan pengusaha ikan dasar membawa banyak perubahan yang lebih baik bagi para nelayan, karena menyediakan pasar alternatif dan penyedia infrastruktur pendukung penangkapan untuk para nelayan. Sama halnya dengan pengusaha ikan dasar, keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dalam hal pembentukan kelompok nelayan yang legal dirasa membuka peluang besar bagi kelangsungan usaha mereka. Kehadiran pengusaha ikan tuna dengan strategi pasarnya, menarik minat nelayan yang dulunya nelayan ikan dasar untuk menjadi nelayan ikan tuna. Karena, harga yang ditawarkan relatif tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pengusaha ikan dasar yang hanya berkisar 12.000-16.000/kilo gram, sedangkan ikan tuna berkisar 20.000 sampai 25.000/kilo gramnya. Jadi janganlah heran sebagian nelayan ikan dasar banyak yang beralih menjadi nelayan ikan tuna untuk saat ini. Hal tersebut disampaikan Bapak Aman La Baco, beliau menuturkan bahwa:

*“Saya yang dulunya adalah nelayan ikan dasar, sejak kehadiran pengusaha ikan tuna saya beralih menjadi nelayan ikan tuna, karena, harganya saya rasa cukup tinggi dan ditambah kami tak repot-repot mendapatkan BBM, umpan dan es saat kami pergi melaut”. (Hasil temuan analisis, pada tanggal 4 Februari 2017).*

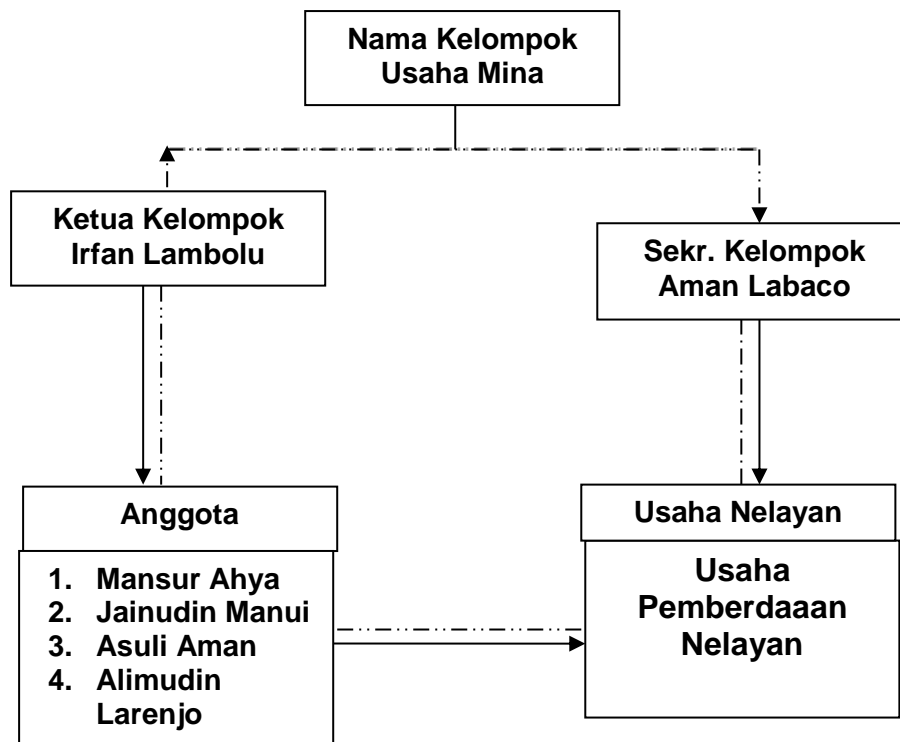
Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan pada nelayan yang ada di Desa Madopolo dirasa cukup membantu proses penangkapan ikan nelayan, penyediaan pasar alternatif dan keberlangsungan hidup bagi para nelayan. Pemberian bantuan berupa nilon, mata kail, es, minyak adalah kebutuhan mendasar bagi proses penangkapan, dan perlengkapan pendukung seperti suku cadang mesin,cat dan lem semua diberikan tanpa persyaratan seperti pemberian bantuan dari instansi terkait. Pemberian bantuan bagi para nelayan di bedakan berdasarkan jenis tangkapan dan pengusaha swasta. Pemberian bantuan bagi para

nelayan ikan tuna diberikan oleh pengusaha ikan tuna dan pemberian bantuan kepada nelayan ikan dasar di berikan oleh pengusaha ikan dasar. Dengan kata lain, urgensi bagi nelayan adalah memberikan peluang bagi para nelayan agar *survive* serta membentuk karakter nelayan tangguh dan berdaya yang mampu bersaing dengan bantuan yang diberikan. Harus diketahui bersama, pengusaha memberikan bantuan tidak dengan cuma-cuma, mereka memberikan bantuan dengan tujuan tersendiri yaitu menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Setidaknya mereka hadir di Desa Madopolo memberikan banyak manfaat bagi para nelayan, yang tidak diberikan oleh instansi terkait.

**Jumlah Kelompok**

Kehadiran bantuan bagi para nelayan haruslah berdasarkan permintaan dari kelompok nelayan yang legal dan terdaftar di dinas terkait. Tapi ketersediaan kelompok yang diharapkan bagi persyaratan agar dapat mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Kelautan dan Perikanan tak dapat terpenuhi. Pengurusan seperti ini dirasa cukup menyusahakan para nelayan. Seperti yang terjadi dilapangan, hanya nelayan ikan tunalah yang memiliki kelompok sedangkan nelayan ikan dasar tidak memiliki kelompok, kelompok nelayan ikan dasar tidaklah terdaftar didinas terkait. Adapun kelompok nelayan ikan tuna yang terdapat di Desa Madopolo sebagai berikut:

**Skema  
Struktur Kelompok Nelayan Ikan Tuna Usaha Mina**



Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Keterangan  
Kordinasi : .....  
Instruksi : —————→

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang nelayan ikan tuna yang juga ketua kelompok nelayan Mina Bahari Bapak Irfan, beliau menuturkan bahwa:

*“Kelompok nelayan yang ada di Desa Madopolo terdapat dua kelompok nelayan ikan tuna yaitu usaha mina dan mina bahari yang mana kelompok ini telah terbentuk ± 6 tahun terakhir” (Hasil analisis temuan, pada tanggal 17 Februari 2017)*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui kedua kelompok nelayan tersebut dibentuk oleh beberapa orang dan tak pernah di daftarkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga bantuan yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini masih juga belum dirasakan oleh para nelayan ikan tuna dan nelayan ikan dasar. Kehadiran pengusaha ikan atau pun swasta dengan strateginya memberikan bantuan sangat menopang proses penangkapan khususnya nelayan ikan tuna. Namun sangat berbeda dengan nelayan ikan dasar yang belum teralalu optimal mendapatkan bantuan dari swasta, karena ada beberapa syarat khusus yang perlu mereka sepakati bersama pihak pengusaha/swasta.

### **Jenis Bantuan yang diberikan**

Terobosan dari para pengusaha ikan tuna dan ikan dasar dirasa sangatlah membantu nelayan dengan strategi pasarnya memberi bantuan berupa : es, umpan, BBM, tali pancing, mata kail, dan bahkan memberikan bantuan berupa lem, cat dan suku cadang agar merawat perahu nelayan dan mesin agar tetap dengan kondisi baik selama mereka melaut. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang nelayan ikan tuna Bapak Abudu, beliau menuturkan:

*“Kami diberikan bantuan dari para pengusaha ikan ini berupa es, minyak, umpan, nilon, dan bahkan mereka memberikan kami cat dan lem agar menjaga perahu kami tetap terlihat baik”.*(Hasil analisis temuan, pada tanggal 16 Februari 2017)

Hal yang serupa disampaikan salah seorang nelayan ikan tuna Bapak Alimudin Larenjo, beliau menuturkan:

*“Kami nelayan ikan tuna menerima bantuan dari pengusaha swasta berupa es, minyak, nilon, dan mata kail kami juga menerima bantuan suku cadang mesin jika kami perlukan sewaktu-waktu”*(Hasil wawancara 7 Mei 2017).

Pemberian bantuan kepada para nelayan dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan kepada nelayan ikan tuna oleh pengusaha ikan tuna dan

pemberian bantuan kepada nelayan ikan dasar oleh pengusaha ikan dasar. Pemberian bantuan kepada nelayan ikan dasar oleh pengusaha ikan dasar yang diberikan terlebih dahulu diberitahukan agar disediakan sebelum di ambil dari pengusaha ikan. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang nelayan ikan dasar Bapak Laabu, beliau menuturkan bahwa:

*“Pengusaha ikan dasar memberikan bantuan kepada para nelayan ikan dasar, sedangkan pengusaha ikan tuna memberikan bantuan kepada nelayan ikan tuna, pengusaha ikan dasar memberikan bantuan kepada kami nelayan ikan dasar berupa es, umpan, minyak, nilon dan mata kail yang diberikan apabila kami telah memberitahukan terlebih dahulu”(Hasil analisis temuan, pada tanggal 8 Mei 2017).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui eksistensi pengusaha ikan dasar sejak tahun 2000 hingga sekarang dan pengusaha ikan tuna sejak tahun 2010 hingga sekarang, memberikan bantuan kepada para nelayan dirasakan sangat membantu nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya guna keberlangsungan bernelayan mereka. Kehadiran pengusaha ikan tuna juga membuat banyak perubahan khususnya nelayan ikan tuna dengan dibentuknya dua kelompok nelayan, meski kelompok yang dibentuk para nelayan ikan tuna tidak legal dimata hukum.

Ada dua kelompok nelayan yang berada di Desa Madopolo yang terdiri dari kelompok nelayan Usaha Mina dan kelompok nelayan Mina Bahari. Kelompok ini yang dibentuk seadanya tanpa legalitas dari instansi terkait karena keterbatasan pendidikan, pembentukan kelompok yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, meski dibentuk seadanya kelompok ini adalah kelompok yang cukup berkembang dengan bantuan yang diberikan pengusaha/swasta. Dengan kata lain pemberian bantuan dari pengusaha swasta tanpa memerlukan persyaratan administrasi yang rumit. Eksistensi pengusaha swasta ditandai dengan bantuan yang diberikan berupa nilon, mata kail, es, dan umpan sebagai keperluan mendasar dan bahkan mereka diberikan cat, onderdil dan perlengkapan perahu nelayan. Bantuan ini diberikan kepada nelayan dengan tujuan agar mereka bisa melaut secara rutin dan tidak terganggu dengan keperluan mendasar yang merepotkan.

## **Dampak Pasca Pemberdayaan Nelayan Terhadap Pendapatan Terhadap Pendapatan**

Bantuan yang diberikan pada nelayan ikan dasar dan nelayan ikan tuna oleh pengusaha ikan dasar dan pengusaha ikan tuna berdampak baik dan sangat membantu meningkatkan daya tangkap nelayan dan juga pendapatan nelayan. Hal tersebut disampaikan salah seorang nelayan Bapak Irfan,, beliau menuturkan bahwa:

*“Sejak adanya pengusaha ikan tuna di kampung ini hingga sekarang, saya merasakan ada perbedaan diantaranya, hasil tangkapan dan uang yang saya terima setiap pergi melaut meningkat dari biasanya sebelum adanya bantuan saya hanya memperoleh sekitar 500.000 sampai 900.000 setiap melaut, sekarang saya dapat memperoleh 500.000 sampai 1 juta setiap melaut” (Hasil analisis temuan, pada tanggal 17 februari 2017).*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ikhsan, beliau menuturkan bahwa:

*“Hasil tangkapan saya sejak adanya pengusaha ikan dasar dikampung ini dirasa meningkat dengan bantuan yang diberikan kepada saya, uang yang saya hasilkan juga meningkat yang biasanya sebelum adanya bantuan 400.000-600.000 setiap melaut, sekarang saya dapat menghasilkan sekitar 400.000 sampai 1 juta setiap melaut.” (Hasil analisis temuan, pada tanggal 13 Februari 2017).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada nelayan juga berdampak pada hasil yang mereka peroleh, nelayan ikan tuna rata ratanya mereka peroleh setiap melautnya sebelum mendapatkan bantuan 500.000 sampai 900.000 setiap melaut, setelah menerima bantuan mereka dapat memperoleh 500.000 sampai dengan 1 juta setiap melaut dan bantuan yang diberikan kepada nelayan ikan dasar juga dirasa meningkatkan penghasilan mereka, yang sebelum memperoleh bantuan 400.000 sampai 1 juta setiap melaut. Jadi, dengan bantuan yang diberikan kepada nelayan sangatlah memberi manfaat terutama penghasilan yang mereka hasilkan setiap kali mereka melaut.

### **Kondisi Keluarga**

Bantuan yang diberikan kepada nelayan ikan dasar dan nelayan ikan tuna oleh pengusaha ikan dasar dan ikan tuna juga berdampak positif pada kondisi keluarga. Dengan penghasilan setiap kali melaut juga berdampak pada kondisi keluarga dan daya beli keluarga juga meningkat. Hal tersebut disampaikan salah seorang nelayan ikan tuna Bapak Lamani, beliau menuturkan bahwa:

*“Kondisi keluarga saya banyak berubah sejak adanya bantuan dari pengusaha ikan tuna, saya juga dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan membeli beberapa beberapa kebutuhan keluarga seperti tv, para bola, dan kulkas, dan kulkas yang saya beli untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya juga saya digunakan untuk menjual es” (Hasil analisis temuan, pada tanggal 5 Februari 2017).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa hasil pemberdayaan yang diberikan pihak swasta sangat mempengaruhi kebutuhan keluarga dimana mereka telah mampu membeli sejumlah kebutuhan terstier, selain itu dengan fasilitas yang dimiliki dapat dikembangkan untuk usaha lain. Bantuan yang diberikan kepada para nelayan, oleh sebagian keluarga lain dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha keluarga dalam bidang kuliner.

Berbeda dengan kedua nelayan diatas, bagi Bapak Laela bantuan dari pengusaha dipergunakan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, hasil dari bantuan tersebut dipergunakan untuk membeli sejumlah perabot rumah, beliau menuturkan beliau menuturkan bahwa:

*“Sejak awal saya menjadi nelayan ikan dasar dan menerima bantuan dari pengusaha ikan dasar, saya merasa terbantu dan meningkatkan taraf hidup dan daya beli keluarga, saya juga dapat membeli perabotan rumah seperti tv, para bola DVD dan bahkan saya mampu membeli kulkas untuk keperluan keluarga saya” (Hasil analisis temuan, pada tanggal 10 Februari 2017).*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bantuan yang diberikan berdampak pada kondisi keluarga seperti meningkatkan taraf hidup keluarga, meningkatkan daya beli, dan memberi mereka peluang membuka usaha lain dengan modal yang mereka dapatkan dari hasil melaut mereka. Misalnya, mereka menjual kuliner olahan berbahan dasar hasil tangkapan mereka seperti ikan panggang, suntung saus dan jualan yang lain yang mereka jual dipelabuhan penyeberangan Jujame

### **Pendidikan Anak**

Menyekolahkan anak adalah tuntutan bagi setia orang tua, begiu pula bagi nelayan yang berada di Desa Madopolo. Dengan adanya bantuan yang diberikan pengusaha ikan sangatlah memberi banyak manfaat kepada para nelayan, salah satunya pendidikan anak. Nelayan di Desa Madopolo sekarang mampu menyekolahkan anak-anaknya dan bahkan melanjutkan mereka kejenjang perkuliahan hingga selesai. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Aman Labaco, menuturkan bahwa:

*“Banyak nelayan ikan tuna di kampung ini mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke bangku perkuliahan, saya adalah salah satunya. Anak saya yang bernama Rusli Aman, saya bisa sekolahkan dia hingga dia menyelesaikan kuliahnya dan sekarang dia telah menjadi guru penjaskes di Sekolah Aliyah Alkhairat dan Tsanawiyah Alkhairaat Madopolo” (Hasil analisis temuan, pada tanggal 4 Februari 2017).*

Hal yang serupa juga ditegaskan salah seorang nelayan ikan dasar, beliau menuturkan bahwa:

*“Saya sangat bersyukur karena adanya bantuan dari pengusaha ikan dasar, karena bantuan mereka saya bisa menyekolahkan anak-anak saya hingga sekarang dan bahkan sekarang dia sedang berkuliah di salah satu kampus kesehatan dengan jurusan kebidanan yang ada di Yogyakarta” (Bapak Laabu, hasil temuan analisis, pada tanggal 16 Februari 2017).*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diberikan dari bantuan yang diberikan kepada para nelayan ikan tuna dan nelayan ikan dasar oleh pengusaha ikan tuna dan pengusaha ikan dasar sangatlah terasabagi para nelayan, pendidikan anak adalah satu diantaranya, mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka dan mereka mampu melanjutkan anak-anak mereka hingga kebangku perkuliahan bahkan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan.

### **Dukungan Masyarakat**

Awal mula hadirnya pengusaha ikan tuna dan pengusaha ikan dasar di Desa Madopolo terasa banyak membantu para nelayan. Hal tersebut disampaikan salah seorang masyarakat desa Madopolo, beliau menuturkan bahwa:

*“Kami sangat mendukung kehadiran para pengusaha ikan di Desa Madopolo khususnya pengusaha ikan dasar, selain memberikan bantuan kepada para nelayan dan membeli ikan hasil tangkapan mereka dengan harga yang cukup tinggi untuk dijual kembali di Labuha atau di Ternate, mereka juga menjualnya di sini (Desa Madopolo) dengan harga relatif murah” (Bapak Muhidin, hasil analisis temuan, pada tanggal 16 Februari 2017).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengapresiasi kehadiran pengusaha atas pemberian bantuan kepada para nelayan dan membeli hasil tangkapan mereka dengan harga yang relatif tinggi dan juga menjualnya tak hanya di luar daerah tapi di dalam desa juga dengan harga terjangkau.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pemberdayaan yang diberikan oleh pengusaha swasta dibedakan berdasarkan jenis nelayan sebagai penerima dan pengusaha sendiri sebagai pemberdaya yaitu pemberdaya nelayan ikan tuna dan ikan dasar. Pemberdayaan kepada nelayan diberikan dalam bentuk pemberian nilon, mata kail, es serta umpan sebagai kebutuhan mendasar penangkapan.
2. Dampak dari pemberdayaan yang diberikan oleh pengusaha ikan tuna dan pengusaha ikan dasar dirasakan para nelayan ikan tuna dan nelayan ikan dasar diantaranya ialah peningkatan pendapatan yang berpengaruh kepada kondisi keluarga yakni taraf hidup keluarga, meningkatnya daya beli keluarga, pendidikan anak, dan bahkan memberi mereka peluang membuka usaha lain dengan modal yang mereka dapatkan dari hasil melaut.
3. Kendala pemberdayaan nelayan antara lain: cuaca buruk bagi pemberdayaan nelayan sangat berakibat pada pendapatan dan keselamatan mereka serta gangguan kesehatan dan acara keluarga. Jika cuaca buruk dapat berakibat pendapatan masyarakat nelayan dan jika nelayan melaut bisa mengancam keselamatan.

### **Saran**

1. Peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat melakukan intervensi kepada nelayan dalam memberikan perlengkapan alat tangkap yang memadai serta melakukan sosialisasi kepada para nelayan tentang keselamatan pelayaran laut.
2. Diharapkan dengan bantuan swasta kepada nelayan perlu ditingkatkan dalam bentuk pemberdayaan perorangan dan kelompok, dan pelatihan penggunaan teknologi penangkapan. Dengan dampak positif yang ditimbulkan dari pemberdayaan diharapkan dapat dipergunakan untuk keperluan yang diutamakan dan bernilai produktif.
3. Diharapkan dengan adanya kendala-kendala dalam pemberdayaan seperti cuaca buruk, gangguan kesehatan dan acara keluarga harus disikapi dengan melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan peluang usaha yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dendasurono, Prawiroatmodjo (2005), *Pendidikan Lingkungan Kelautan*. Jakarta: PT. Asdi Djubedi, Daud. 2015. *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press
- Kartasasmita, G (1996). *Pembanguna Untuk rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Kusnadi (2005), *Akar kemiskinan Nelayan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Moleong, Lexy J (1993), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasikun (2012), *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prawiroatmojo, Dendasurono (2005), *Pendidikan Lingkungan Laut*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sahdan, S (2004), *Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa, Jurusan Ilmu Pemerintahan*. STPMD APMD: Yogyakarta
- Sarwono, Jonathan (2006), *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soeratno (1995), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN
- Sumardjao. 1999. *Transformasi Model Pertanian Menuju Kemandsirian Pentani*. Disertasi Bogor: IPB
- Sumidinigrat, G (1997), *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Kedua*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Supriatna, Tjahya (1997), *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung Humaniora Utama Pres
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato (2015) *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Prespektif kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- La Suhu, B., & Wance, M. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- Osborne, David and Ted Gaebler (2000) *Mewirusahaakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Birokrasi ke Dalam Sektor Birokrasi*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Persindo
- Wrihartnolo, R.R dan R.D. Dwijowiyoto (2007) *Menejemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Alex Komputindo

### Halaman Web

<<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>> di akses pada 08 Januari 2017 , Pukul 11:34 Wit).

<https://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/14/.23/12/2015/02:06> di akses pada 30 Januari 2017 , Pukul 11:34 Wit).

<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-bums-fungsi-ciri-ciri-bentuk-bentuk-bums.html#/23/12/2015/01:47> di akses pada 20 Januari 2017 , Pukul 11:34 Wit).

<http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur>. di akses pada 08 Januari 2017 , Pukul 11:34 Wit).